



**TAHUN
2024**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**L
K
j
i
P**

**DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
KABUPATEN
MUNA BARAT**



**Jalan Ring Road
Desa Waukuni
Kec.Sawerigadi
LAWORO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA semata pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat menyusun laporan kinerja tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang kelautan dan perikanan atas realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada masa yang akan datang.

Laworo, 25 Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat



SUKARTI LYKRA, S.Pd., MM
Pembina Tk. I., Gol. IV/b
NIP. 19731008 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat disusun dengan maksud memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* penting kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang dihasilkan di tahun 2024 sebagaimana Indikator Kinerja Utama, seluruhnya dapat mencapai target sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) **tidak memenuhi target** dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 98,86%, dan kriteria **SANGAT BAIK**.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dengan Indikator Kinerja sasaran ini adalah Nilai Evaluasi Sakip Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun sebelumnya menjadi predikat Baik

Berbagai catatan diatas, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi serta saran, akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada umumnya dalam upaya perbaikan pelaksanaan kerja di masa

mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dalam memberi manfaat kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	4
1.5. Isu-isu Strategis OPD.....	10
1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3. Program dan Kegiatan	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	22
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	28
BAB IV. PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Rekomendasi.....	43



DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>T e k s</i>	<i>Hal</i>
Tabel I.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Menurut Jabatan Tahun 2024	9
Tabel I.2	Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel I.3	Kondisi ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Menurut Jenjang Kepangkatan Tahun 2024..	10
Tabel 2.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	14
Tabel 2.1.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	14
Tabel 2.2.1	Target Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	15
Tabel 2.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat Tahun 2024	16
Tabel 2.3.2	Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat APBD Perubahan Tahun 2024	21
Tabel 2.3.3	Ringkasan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	21
Tabel 3.1.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 3.1.2.	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat Tahun 2024	23
Tabel 3.1.3.	Produksi Perikanan Kabupaten Muna Muna Barat Tahun 2023 hingga Tahun 2024	23
Tabel 3.1.4.	Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun ini beberapa tahun terakhir	25
Tabel 3.1.5.	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	26
Tabel 3.2.1.	Capaian Realisasi DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	29

Tabel 3.2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	30
Tabel 3.2.3.	Capaian Realisasi Anggaran per Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	31
Tabel 3.2.4.	Analisis Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	37



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>T e k s</i>	<i>Hal</i>
Gambar I.1	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

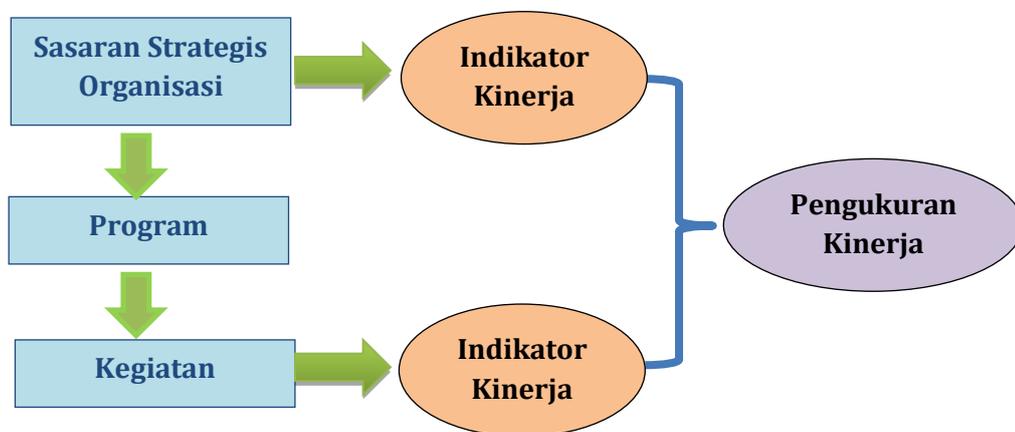
Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam rangka itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban berupa LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Sumber dana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Muna Barat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja *output* dan atau *outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan kinerja mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram I.1.

Gambar I.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat ini dimaksudkan sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat selama tahun anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada tahun 2024, dan diharapkan
- c. Dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat di masa yang akan datang; serta
- d. Untuk melaksanakan penerapan SAKIP di jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Landasan idil yaitu Pancasila;
- b. Landasankonstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945;
- c. LandasanOperasional yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;

1.4. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan pengelolaan Pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penertiban SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penertiban SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;
- h. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 yang terdiri atas : 1 (satu) Kepala Dinas; 1 (satu) Sekretaris, terdiri atas 2 (dua) sub bagian; dan 4 (empat) bidang, masing-masing terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang di lingkungan unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan, aset dan evaluasi serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. pengelolaan penyusunan program Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha nelayan kecil;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha kecil pembudidaya ikan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI

Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidang budidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :

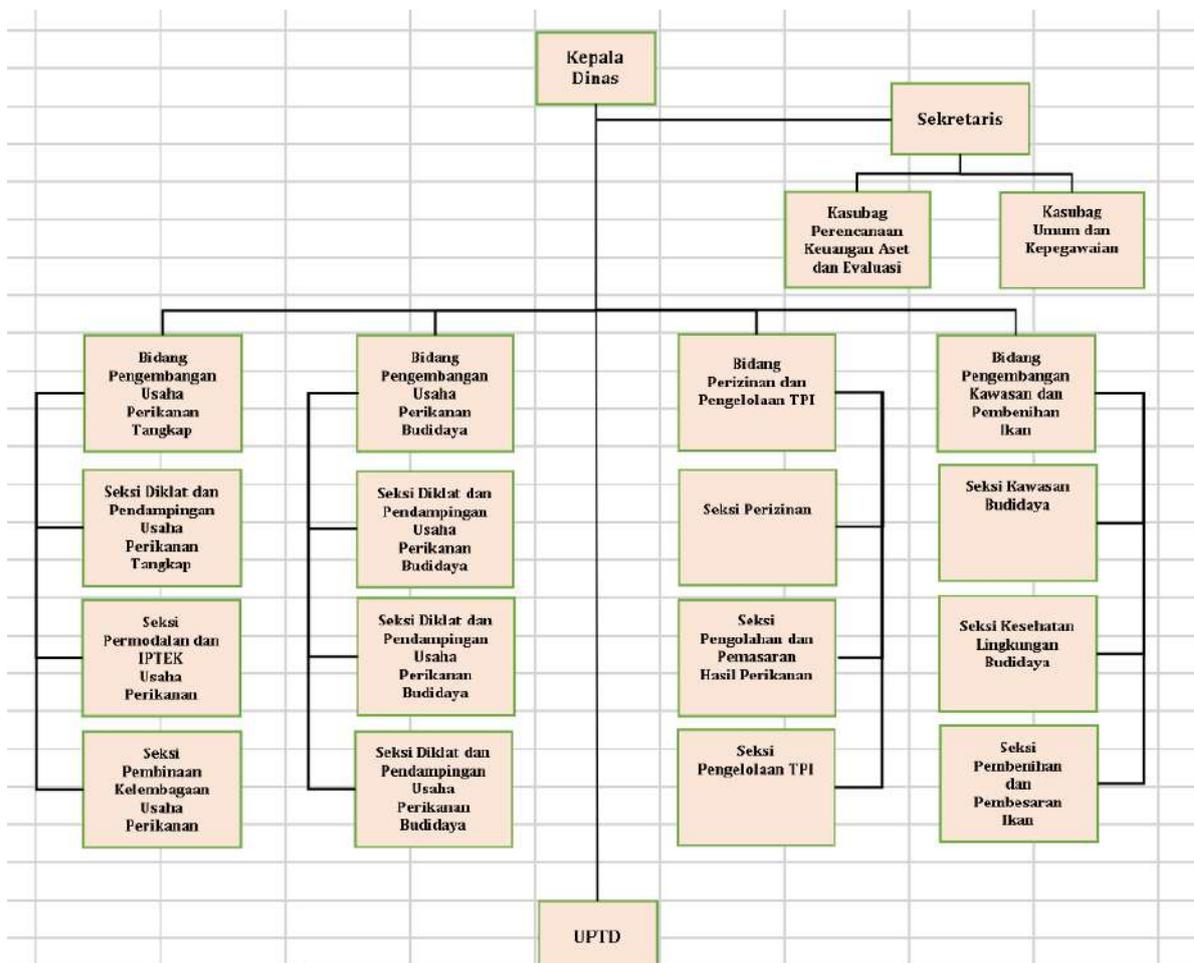
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidaya Ikan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidaya Ikan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidaya Ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat seperti pada Gambar I.2 berikut ini :

Gambar I.2.
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat





2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat di dukung oleh 24 Orang ASN dan juga honorer sebanyak 38 orang. Gambaran kondisi ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel I.1.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat Menurut Jabatan Tahun 2024

No	Eselon	Jumlah ASN Yang ada
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	4
4	Eselon IVa	6
5	Staf	12
	Jumlah	24

Tabel I.2.
Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1.	Sekolah Menengah Umum (SMU)	1
2.	Sarjana Strata 1	20
3.	Sarjana Strata 2	3
	JUMLAH	24

Tabel I.3
Kondisi ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
Menurut Jenjang Kepangkatan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pengatur/Golongan II	1
2.	Penata/Golongan III	17
3.	Pembina/Golongan IV	6
4.	Tenaga Honorer	28
	Jumlah	52

1.5. Isu-isu Strategis OPD

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Minimnya pelaksanaan pengawasan kelautan,;
- 4) Belum maksimalnya pengelolaan hasil produksi perikanan untk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan.
- 5) Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok.
- 6) Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi perikanan dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- 7) Menurunnya daya dukung lingkungan perairan yang berakibat pada semakin terdegradasinya sumberdaya kelautan dan perikanan

1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 memuat Ringkasan Eksekutif dan Penjelasan Bab.

Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I PENDAHULUAN, yang memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

Bab II PERENCANAAN KINERJA, yang memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disamping itu, disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV PENUTUP, memuat simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumberdaya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Kabupaten Muna Barat Nomor dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat

A. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatkan produksi perikanan;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pelayanan Dinas kelautan dan Perikanan.

B. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dipresentasikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan produksi perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Produksi Perikanan (%)	5	5	5	5
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	B	B

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tahun ini} - \text{jumlah produksi perikanan tahun lalu}}{\text{jumlah produksi perikanan tahun lalu}} \times 100\%$	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat Tahun 2023-2026, RKT Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat Tahun 2024, IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, dan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Esselon II) sebagaimana tertera dalam tabel di bawah dan setiap Esselon III dan Esselon IV sebagaimana dalam halaman lampiran.

Tabel 2.2.1. Target Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2023	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya produksi perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	5	-	-	-	5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasi Pemeriksaan SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Inspektorat	Kategori	B	-	-	-	B

2.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dilaksanakan dengan pengalokasian Program Kegiatan Pembangunan Perikanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat Tahun 2024

Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		3.016.352.691	DAU	
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		22.660.000	DAU	
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.800.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	17.860.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang tersedia		2.193.398.694	DAU	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/Bulan	2.186.148.694	DAU	Kab. Muna Barat
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	6.800.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	225.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	225.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Dok	450.000	DAU	
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	150.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	150.000	DAU	Kab. Muna Barat

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	150.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	1	Dok	525.000	DAU	
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dok	525.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dok	568.526.000	DAU	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	5.240.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dok	24.420.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	33.095.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	500.771.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	95	%	124.999.997	DAU	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	10.999.997	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	114.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK			107.793.000	DAU	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	unit	84.793.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	8.000.000	DAU	Kab. Muna Barat

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	13.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	2.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	% peningkatan produksi perikanan tangkap	5	%	2.506.902.518	DAU	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	1	dok	15.000.000	DAU	
- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	dok	15.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	dok	2.491.902.518	DAU	
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	60	orang	2.475.902.518	DAU	Kab. Muna Barat
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4	klp	16.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	% peningkatan produksi perikanan budidaya	5	%	1.011.214.007	DAU	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang tersedia	1	dok	1.011.214.007	DAU	
- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	6.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	unit	363.045.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	unit	632.169.007	DAU	Kab. Muna Barat
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30	orang	10.000.000	DAU	Kab. Muna Barat

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	persentase usaha perikanan yang sesuai aturan	100	%	4.000.000	DAU	
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1	Dok	4.000.000	DAU	
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	dok	2.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Dok	2.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3	%	153.601.000	DAU	
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang tersedia	1	dok	15.000.000	DAU	
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	dok	15.000.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang tersedia	1	dok	39.700.000	DAU	

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4	unit usaha	39.700.000	DAU	Kab. Muna Barat
Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	1	dok	98.901.000	DAU	
- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12	pelaku usaha	98.901.000	DAU	Kab. Muna Barat
Jumlah Anggaran				6.694.070.216		

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 6.694.070.216,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

Tabel 2.3.2.
Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
APBD Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)
A	PENDAPATAN	150.000.000
B	BELANJA	6.694.070.216
1	Belanja Operasi	6.694.070.216
2	Belanja Modal	-

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.
Ringkasan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Meningkatnya produksi perikanan	3.675.717.525	54,91	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	3.018.352.691	45,09	
	Jumlah	6.694.070.216	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikangambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode		
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua	SB	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda	T	
3	$66 \leq 75$	Sedang	Orange	S	
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda	R	
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah Muda	SR	

Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Untuk mengetahui persentase kenaikan produksi perikanan dari tahun sebelumnya, diukur dengan rumus berikut :

$$\text{Peningkatan Produksi} = \frac{\text{Jmlh produksi perikanan tahun ini} - \text{jumlah produksi perikanan tahun lalu}}{\text{jumlah produksi perikanan tahun lalu}} \times 100$$

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.
Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/Kode
1	Meningkatnya produksi, perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	%	5	3,80	98,86	SB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemeriksaan SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Inspektorat	Predikat/ Nilai	B	B	100	SB

Nilai pada Indikator Kinerja di atas diperoleh dari perbandingan produksi perikanan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dimana produksi perikanan Kabupaten Muna Barat tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.3.
Produksi Perikanan Kabupaten Muna Muna Barat Tahun 2023 hingga Tahun 2024

No	Tahun	Target Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Kinerja	Persentase Kenaikan Jumlah Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(4)
1	2023	29.708,99	29.253,96	98,47	
2	2024	30.716,65	30.365,48	98,86	3,80

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan formulasi penghitungan kinerja yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan bahwa persentase peningkatan produksi perikanan tahun 2024 adalah sebesar 3,80%. Hal ini berarti target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5% belum tercapai. Hal ini diduga disebabkan oleh karena beberapa hal berikut :

- Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan alat yang sederhana (bertumpu pada perikanan tradisional).
- Kegiatan budidaya perikanan juga masih mengandalkan usaha budidaya dengan pola semi intensif.

Namun demikian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan masih dalam predikat Sangat Baik(SB). Persentase pemenuhan kinerja terhadap target yang telah

ditetapkan adalah sebesar 75,99%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berjalan dengan baik dan cukup efisien.

Produksi perikanan yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah agregat dari jumlah produksi bidang perikanan tangkap dan jumlah produksi bidang perikanan budidaya. Dan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa variable kinerja antara lain :

- Melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap berupa perahu; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa penyediaan alat-alat tangkap kepada nelayan turut membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan.
- Melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan kepada pembudidaya ikan turut memunjang kelangsungan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Muna Barat.
- Melalui Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang memberikan dorongan kepada nelayan dan pembudidaya ikan untuk turut melakukan aktifitas penangkapan ikan dan budidaya ikan secara ramah lingkungan sehingga kelangsungan sumberdaya hayati tetap terjaga sehingga pengelolaan Perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan
- Melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan secara tidak langsung memacu nelayan dan pembudidaya ikan dalam berusaha dengan meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat.

b. Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.4. Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun ini beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Sat.	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
				(%)	Not			(%)	Not			(%)	Not			(%)	Not			(%)	Not	
1	Persentase peningkatan produksi perikanan	(%)	10	-34,04	59,96	SR	10	32,76	120,69	SB	10	11,72	101,56	SB	5	3,39	98,47	SB	5	3,80	98,86	SB

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu upaya meningkatkan produksi perikanan secara umum sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup bervariasi. Pada tahun 2020, target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tidak tercapai bahkan memperoleh predikat Sangat Rendah (SR). Hal ini diakibatkan oleh terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak secara global terhadap dunia usaha tak terkecuali dengan usaha-usaha pada sektor kelautan dan perikanan yang mengalami kemandekan usaha. Akan tetapi dengan cukup relative cepat kita bisa bertahan dan bangkit dari keterpurukan tersebut yang dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, produksi perikanan Kabupaten Muna Barat masih memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi peningkatan produksi perikanan mencapai 11,72%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, persentase peningkatan produksi tersebut mengalami penurunan.

Dengan melihat tren produksi perikanan yang ada, maka pada tahun 2023 melalui Renstra Peralihan 2023-2026, target peningkatan produksi perikanan mengalami perubahan yaitu persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 5% dari jumlah produksi tahun sebelumnya.

Produksi perikanan tahun 2024 tidak memenuhi target produksi yang telah ditetapkan sebesar 5% peningkatan produksi dari tahun sebelumnya. Realisasi peningkatan produksi perikanan hanya mencapai 3,80%. Hal ini diduga diakibatkan oleh terjadinya degradasi sumberdaya alam yang diakibatkan oleh

pengelolaan sumberdaya alam dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan tanpa memperhatikan kelangsungan sumberdaya alam tersebut. Untuk itu diperlukan langkah nyata dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lebih bijaksana dan melibatkan berbagai stakeholder lintas sektor. Disamping itu, diperlukan inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih modern dalam kegiatan penangkapan ikan dan usaha budidaya perikanan.

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini dengan target jangka menengah disajikan pada tabel 3.1.4. berikut :

Tabel 3.1.5. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja (%)
	Persentase peningkatan produksi perikanan	5,00 %	3,80 %	98,86

Tabel di atas menunjukkan bahwa target persentase peningkatan produksi perikanan tidak terpenuhi. Namun demikian Realisasi tersebut masih tergolong baik.

d. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi Alternatif

Penilaian besaran produksi perikanan Kabupaten Muna Barat ditopang oleh 2 sub sektor perikanan yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Indikator Kinerja pada sub sektor perikanan tangkap adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 5% dari produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya. Begitu pula dengan indikator kinerja pada sub sektor perikanan budidaya yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 5%. Untuk mendorong produksi perikanan tangkap maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat mengalokasikan anggaran pada beberapa Program Kerja yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebesar Rp. 2.506.902.518,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 2.503.483.820,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) atau mencapai 99,86%.

2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau mencapai 100% realisasi.

Dengan realisasi anggaran yang mencapai 99,86% pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 100% pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 5,50% melebihi target peningkatan produksi perikanan tangkap yang telah ditetapkan sebesar 5%.

Adapun untuk mendorong produksi perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat juga mengalokasikan anggaran pada beberapa Program Kerja yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp. 1.011.214.007,- (Satu Milyar Sebelas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 981.651.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) atau mencapai 97,07%.

2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Alokasi anggaran pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau mencapai 100% realisasi.

Dengan realisasi anggaran yang mencapai 97,07% pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan 100% pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya hanya mencapai 2,31% dibawah target peningkatan produksi perikanan budidaya yang telah ditetapkan sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun pelaksanaan program kerja telah terealisasi dengan optimal, tetapi masih ditemukan beberapa

hambatan/tantangan dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muna Barat diantaranya :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya yang dimiliki oleh pembudidaya ikan. Hal ini berkaitan dengan permodalan yang dimiliki pembudidaya ikan sehingga mereka tidak mampu mengoptimalkan usaha budidaya ikan yang diusahakan.
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara budidaya ikan yang baik dan benar yang pada akhirnya membuat hasil produksi ikan budidaya yang tidak maksimal.
3. Pengelolaan lahan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan budidaya ikan.

Beberapa solusi alternatif yang bisa diupayakan guna mendorong produksi perikanan di Kabupaten Muna Barat antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan baik bagi nelayan maupun pembudidaya ikan. Penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional perlu dialihkan dengan menggunakan alat penangkapan yang lebih modern tetapi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan/kelestarian sumberdaya ikan. Begitu pula dengan usaha budidaya ikan yang saat ini masih banyak dilakukan dengan sistem tradisional dan semi intensif, perlu dialihkan menjadi usaha budidaya ikan dengan sistem budidaya ikan secara intensif
2. Dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif terhadap pembudidaya ikan dalam usaha budidaya ikan sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir
3. Fasilitasi pendanaan usaha yang dipermudah bagi pembudidaya ikan. Utamanya terkait dengan perkreditan pada bank-bank konvensional.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Besaran pagu anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024 adalah Rp. 6.694.070.216,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar

Rp. 6.694.070.216,-. Berdasarkan pagu belanja tersebut, anggaran yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 6.654.002.930,- atau 99,40% dari target belanja.

Sementara itu target Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Retribusi Hasil Usaha Perikanan namun pemenuhan target tersebut tidak ada yang terealisasi.

Capaian realisasi DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1. Capaian Realisasi DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No	Uraian	Target DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
A	PENDAPATAN	150.000.000	0	0,00
B	BELANJA	6.694.070.216	6.654.002.930	99,40
1	Belanja Operasi	6.694.070.216	6.654.002.930	99,40

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah terlihat tidak memenuhi target karena tidak adanya obyek retribusi daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Untuk memungut retribusi daerah dari sektor kelautan dan perikanan diperlukan layanan dari pemerintah daerah terhadap usaha kelautan dan perikanan. Layanan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat berupa penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, atau jasa usaha lainnya milik Pememrintah Daerah sebagai objek retribusi daerah. Akan tetapi Kabupaten Muna Barat saat ini tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan yang beroperasi ataupun jasa usaha lainnya milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan penarikan retribusi daerah dari sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu realisasi belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai 99,40% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran kegiatan dimaksud.

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Upaya mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terus dilakukan dengan upaya menyampaikan laporan realisasi anggaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja dinas tahun 2024. Anggaran yang diperjanjikan dan dipertanggungjawabkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 6.694.070.216,- (*Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*). Adapun Nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 6.654.002.930,- (*Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Penjabaran realisasi penggunaan anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan tersebut terinci dalam penjabaran tabel 3.2.2. berikut :

Tabel 3.2.2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi perikanan	Presentase Produksi Perikanan (%)	5	3,80	98,86	3.675.717.525	3.640.734.820	99,05
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemeriksaan AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Inspektorat	B	B	100	3.018.352.691	3.011.268.110	99,77
Jumlah						6.694.070.216	6.654.002.930	99,40

Adapun rincian anggaran dan realisasi pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel 3.2.3. berikut :

Tabel. 3.2.3. Capaian Realisasi Anggaran per Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keuangan		
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	100 %	100 %	3.018.352.691	3.011.268.110	99,77%
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B		22.660.000	22.660.000	100,00%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	4.800.000	4.800.000	100,00%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	17.860.000	17.860.000	100,00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	2.193.398.694	2.192.948.694	99,98%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/Bulan	24 orang/Bulan	2.186.148.694	2.186.148.694	100,00%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	6.800.000	6.800.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	225.000	-	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	225.000	-	0,00%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	450.000	450.000	100,00%

	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	laporan	1	Laporan	150.000	150.000	100,00%
	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	Laporan	150.000	150.000	100,00%
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	150.000	150.000	100,00%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	1	Dok	1	Dok	525.000	-	0,00%
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dok	1	dok	525.000	-	0,00%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Dok	1	Dok	568.526.000	568.141.271	99,93%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	5.240.000	5.199.000	99,22%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	5.000.000	5.000.000	100,00%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dok	1	paket	24.420.000	24.420.000	100,00%
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	1	paket	33.095.000	32.781.000	99,05%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	dok	500.771.000	500.741.271	99,99%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia	1	dok	1	dok	124.999.997	124.972.040	99,98%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	10.999.997	10.972.040	99,75%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	114.000.000	114.000.000	100,00%
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	1	dok	1	dok	107.793.000	102.096.105	94,71%

-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	unit	18	unit	84.793.000	79.096.105	93,28%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	10	unit	8.000.000	8.000.000	100,00%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	13.000.000	13.000.000	100,00%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	2.000.000	2.000.000	100,00%
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	% peningkatan produksi perikanan tangkap	5	%	5,5	%	2.506.902.518	2.503.483.820	99,86%
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	1	dok	1	dok	15.000.000	15.000.000	100,00%
-	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	dok	1	dok	15.000.000	15.000.000	100,00%
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	dok	1	dok	2.491.902.518	2.488.483.820	99,86%
-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	60	orang	250	orang	2.475.902.518	2.472.508.620	99,86%
-	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4	klp	4	klp	16.000.000	15.975.200	99,85%
C	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	% peningkatan produksi perikanan budidaya	5	%	2,31	%	1.011.214.007	981.651.000	97,08%
1	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang tersedia	1	dok	1	dok	1.011.214.007	981.651.000	97,08%

	Penyediaan Data dan Informasi - Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	6.000.000	6.000.000	100,00%
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan - Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	2 unit	363.045.000	340.579.000	93,81%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana - Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	8 unit	632.169.007	626.122.000	99,04%
	Pembinaan dan Pemantauan - Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 orang	40 orang	10.000.000	8.950.000	89,50%
D	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	persentase usaha perikanan yang sesuai aturan	100 %	100 %	4.000.000	2.000.000	50,00%
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dok	1 Dok	4.000.000	2.000.000	50,00%
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dok	1 Dok	2.000.000	2.000.000	100,00%
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	1 dok	2.000.000	2.000.000	
E	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3 %	30,91 %	153.601.000	153.600.000	100,00%
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	1 dok	1 dok	15.000.000	15.000.000	100,00%

	Skala Mikro Dan Kecil	yang tersedia					
	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dok	1 dok	15.000.000	15.000.000	100,00%
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang tersedia	1 dok	1 dok	39.700.000	39.700.000	100,00%
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 unit usaha	4 unit usaha	39.700.000	39.700.000	100,00%
3	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia	1 dok	1 dok	98.901.000	98.900.000	100,00%
	- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	98.901.000	98.900.000	100,00%
	Jumlah Anggaran				6.694.070.216	6.654.002.930	99,40%

3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang melampaui target dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 sangat efisien. Efisiensi Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.2.4. Analisis Efisiensi Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 berikut :

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Keuangan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.018.352.691	3.011.268.110	100 %	100 %	99,77%	Efisien
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.660.000	22.660.000	B	B	100,00%	Efisien
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	1 dok	1 dok	100,00%	Efisien
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.860.000	17.860.000	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	Efisien
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.193.398.694	2.192.948.694	1 Laporan	1 Laporan	99,98%	Efisien
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.186.148.694	2.186.148.694	24 orang/Bulan	24 orang/Bulan	100,00%	Efisien
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.800.000	6.800.000	1 dok	1 dok	100,00%	Efisien
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	225.000	-	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	Efisien
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	225.000	-	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	Efisien
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	450.000	450.000	1 Dok	1 Dok	100,00%	Efisien
	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	150.000	150.000	1 laporan	1 Laporan	100,00%	Efisien

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000	150.000	1	laporan	1	Laporan	100,00%	Efisien
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000	150.000	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	Efisien
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	525.000	-	1	Dok	1	Dok	0,00%	Efisien
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	525.000	-	1	dok	1	dok	0,00%	Efisien
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.526.000	568.141.271	1	Dok	1	Dok	99,93%	Efisien
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.240.000	5.199.000	1	paket	1	paket	99,22%	Efisien
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	1	paket	1	paket	100,00%	Efisien
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.420.000	24.420.000	1	dok	1	paket	100,00%	Efisien
	- Penyediaan Bahan/Material	33.095.000	32.781.000	1	paket	1	paket	99,05%	Efisien
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.771.000	500.741.271	1	Laporan	1	dok	99,99%	Efisien
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.999.997	124.972.040	1	dok	1	dok	99,98%	Efisien
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.999.997	10.972.040	1	Laporan	1	Laporan	99,75%	Efisien
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	114.000.000	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	Efisien
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.793.000	102.096.105	1	dok	1	dok	94,71%	Efisien

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.793.000	79.096.105	18	unit	18	unit	93,28%	Efisien
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	10	unit	10	unit	100,00%	Efisien
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.000.000	13.000.000	1	unit	1	unit	100,00%	Efisien
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	1	unit	1	unit	100,00%	Efisien
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.506.902.518	2.503.483.820	5	%	5,5	%	99,86%	Efisien
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15.000.000	15.000.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien
	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	15.000.000	15.000.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.491.902.518	2.488.483.820	1	dok	1	dok	99,86%	Efisien
	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.475.902.518	2.472.508.620	60	orang	250	orang	99,86%	Efisien
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	16.000.000	15.975.200	4	klp	4	klp	99,85%	Efisien
C	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.011.214.007	981.651.000	5	%	2,31	%	97,08%	Kurang Efisien
1	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.011.214.007	981.651.000	1	dok	1	dok	97,08%	Efisien
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien

	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	363.045.000	340.579.000	3	unit	2	unit	93,81%	Kurang Efisien
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	632.169.007	626.122.000	8	unit	8	unit	99,04%	Efisien
	- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10.000.000	8.950.000	30	orang	40	orang	89,50%	Efisien
D	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.000.000	2.000.000	100	%	100	%	50,00%	Efisien
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000	2.000.000	1	Dok	1	Dok	50,00%	Efisien
	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	1	dok	1	Dok	100,00%	Efisien
	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	1	Dok	1	dok	100,00%	Efisien
E	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	153.601.000	153.600.000	3	%	30,91	%	100,00%	Efisien
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	15.000.000	15.000.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien
	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien

2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	39.700.000	39.700.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	39.700.000	39.700.000	4	unit usaha	4	unit usaha	100,00%	Efisien
3	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	98.901.000	98.900.000	1	dok	1	dok	100,00%	Efisien
	- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.901.000	98.900.000	2	pelaku usaha	2	pelaku usaha	100,00%	Efisien
	Jumlah Anggaran	6.694.070.216	6.654.002.930						

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 yang berisi uraian tentang capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 6.694.070.216,- dan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.654.002.930,- atau mencapai 99,40%.

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seluruhnya dapat mencapai target sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan produksi perikanan (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) rata-rata pada tahun 2024 adalah sebesar 3,80 %. Nilai ini berada di bawah nilai rata-rata target peningkatan produksi perikanan (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar 5%. Hal ini terjadi karena target peningkatan produksi perikanan budidaya hanya mencapai 2,31%, dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 5%. Adapun terkait dengan peningkatan produksi perikanan tangkap, maka realisasi kinerjanya telah terpenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5%, dengan realisasi persentase peningkatan produksi mencapai 5,50%.
2. Hasil Pemeriksaan AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Inspektorat memperoleh nilai (Predikat) B, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 masih terdapat sejumlah kendala dan hambatan diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana budidaya yang dimiliki oleh pembudidaya ikan. Hal ini berkaitan dengan permodalan yang dimiliki pembudidaya ikan sehingga mereka tidak mampu mengoptimalkan usaha budidaya ikan yang diusahakan.
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara budidaya ikan yang baik dan benar yang pada akhirnya membuat hasil produksi ikan budidaya yang tidak maksimal.
3. Pengelolaan lahan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan budidaya ikan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan baik bagi nelayan maupun pembudidaya ikan. Penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional perlu dialihkan dengan menggunakan alat penangkapan yang lebih modern tetapi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan/kelestarian sumberdaya ikan. Begitu pula dengan usaha budidaya ikan yang saat ini masih banyak dilakukan dengan sistem tradisional dan semi intensif, perlu dialihkan menjadi usaha budidaya ikan dengan sistem budidaya ikan secara intensif
2. Dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif terhadap pembudidaya ikan dalam usaha budidaya ikan sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir
3. Fasilitasi pendanaan usaha yang dipermudah bagi pembudidaya ikan. Utamanya terkait dengan perkreditan pada bank-bank konvensional.

4. Terus memberikan bantuan/hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan untuk mendukung operasional penangkapan ikan serta pemberian akses informasi permodalan.
5. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bintek, pelatihan terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.
6. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan OPD akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap OPD, Provinsi dan Pusat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam penulisan LKjIP ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan yang ada didalamnya sehingga masukan dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan untuk pengembangan selanjutnya kearah yang lebih baik.

Laworo, 25 Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat



SUKARTI LYKRA, S.Pd., MM
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19731008 200312 1 002